



PROVINSI PAPUA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA



Jalan Diponegoro No. 63
Jayapura
Telp. (0967) 537214 – 537215
Website : papua.bnn.go.id
E-Mail : bnnp_papua@bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024 dengan tepat waktu.

Pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dalam implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang sekarang direvisi dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013. Pelaksanaan P4GN di satuan kerja BNNP Papua telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2024.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan program P4GN di Provinsi Papua pada tahun selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja di satker BNNP Papua. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk rekapitulasi data di tingkat nasional untuk pembuatan LAKIP BNN RI dan sebagai bahan penyusunan implementasi rencana kerja dan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Jayapura, 02 Januari 2025



Norman Widjajadi, S.I.K

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
EXECUTIVE SUMMARY.....	5
 BAB I PENDAHULUAN.....	 11
A. Latar Belakang	11
B. Dasar Hukum	13
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	13
D. Struktur Organisasi	17
E. Sistematika Penyajian	21
 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	 22
A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2023	23
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	27
2. Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	28
3. Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN...	28
4. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan I	30
5. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan II	30
6. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika...	31
7. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	32

8. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi.....	32
9. Meningkatnya Aksebilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi.....	33
10. Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.....	34
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.....	34
12. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya II.....	36
13. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika I.....	37
14. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika II.....	40
15. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien I.....	40
16. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien II.....	41
17. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur I.....	44
18. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur II.....	45
19. Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal.....	46
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah. BNNP Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP Papua mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64), Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNNP Papua melaksanakan tupoksi dan wewenang BNN di daerah Provinsi Papua dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 terdapat 5 (lima) pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk mengimplementasikan Program P4GN, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2015-2019. BNNP Papua melaksanakan 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ringkasan singkat capaian dari setiap indikator kinerja utama.

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” diwilayah provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai sebanyak 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Waspada” Menjadi “Aman” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Target yang diberikan adalah 1 Kawasan. Target tersebut telah tercapai 1 Kawasan Rawan yaitu Kelurahan Ardipura Kota Jayapura

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Nilai Keterpulihan Kawan Rawan sebesar 2.51 indeks. Lifeskill di Kelurahan Skow Sae adalah Pembuatan Kerupuk Sagu. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi adalah 2,62 Indeks

Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup**. Target yang diberikan adalah 68 %. Target tersebut telah tercapai 97,47 %

Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**. Target yang diberikan adalah 10 Orang untuk petugas rehabilitasi penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Target tersebut telah tercapai 10 orang terdiri dari 2 orang BNNP, 2 orang BNNK Jayapura, dan 2 orang BNNK Mimika

Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi**. Target yang diberikan adalah 1 lembaga dan tidak tercapai.

Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional**. Target yang diberikan adalah 6 unit. Target tersebut terealisasi 6 terdiri dari 2 BNNP Papua, 2 BNNK Jayapura, dan 2 BNNK Mimika.

Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN**. Target yang diberikan 3.42 Indeks. Target tersebut telah tercapai 3,65.

Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang P-21**. Target yang diberikan adalah 8 Berkas Perkara. Target tercapai 10 Berkas Perkara.

Sasaran Kegiatan 12 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan**. Target yang diberikan yaitu 100 %. Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

Sasaran Kegiatan 13 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika**. Target yang diberikan yaitu 100 % dan Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

Sasaran Kegiatan 14 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 80 Indeks untuk nilai kinerja BNNP Papua realisasi sebesar 93,27. BNNK Jayapura target NKA 87 realisasi sebesar 99,73 dan BNNK Mimika target 55 realisasi sebesar 66.95.

Sasaran Kegiatan 15 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target**. Target 2 BNN Kabupaten/Kota tercapa 2 BNNK. BNNK Jayapura yaitu nilai NKA nya adalah 99,73 dari target 87 Indeks dan BNNK Mimika nilai NKA nya sebesar 66,95 dari target 55.

Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 96,78 Indeks untuk nilai IKPA BNNP Papua. Untuk BNNP Papua tidak mencapai target yaitu nilai IKPA nya sebesar 93,83 %.

Sasaran Kegiatan 17 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target**. Target yang diberikan yaitu 2 BNN Kabupaten/Kota yang nilai IKPA nya mencapai target. Untuk BNNP Papua telah melebihi target yaitu nilai IKPA nya sebesar 96.87. Sedangkan untuk BNNK Jayapura sebesar 96.10 dan BNNK Mimika sebesar 95.64. Kedua BNNK tersebut juga telah melebihi target yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan 18 : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal** Target yang diberikan yaitu 75 Indeks. Untuk BNNP Papua tahun 2023 tidak mencapai target dengan nilai IKPA nya hanya sebesar 71,46 Indeks

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Provinsi Papua terletak di ujung timur wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Papua New Guinea. Provinsi Papua terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota dimana terdapat 5 (lima) kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Hasil pengumpulan informasi dari informan BNNP Papua dapat disimpulkan bahwa cukup banyak peredaran ganja yang masuk ke Provinsi Papua dengan memanfaatkan daerah perbatasan. Peredaran ganja yang tidak dalam pengawasan pemerintah sangat berbahaya bagi generasi muda dan masyarakat Papua. Pemerintah beserta masyarakat harus bergandengan tangan untuk memerangi penyalahgunaan ganja dan jenis narkoba lain yang dapat merusak bangsa. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNNP Papua dibentuk untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BNN di Provinsi Papua.

BNNP Papua melaksanakan P4GN di Provinsi Papua dengan melakukan pencegahan melalui diseminasi informasi dan advokasi, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternative dan peningkatan peran serta masyarakat, serta rehabilitasi dan program pasca rehabilitasi. Melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba melalui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan asset serta bidang hukum dan kerjasama melalui hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum.

BNNP Papua tidak dapat melakukan P4GN tanpa melibatkan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di Provinsi Papua . Hal ini sejalan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden(Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2015-2019. Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/lembaga/instansi masing-masing.

BNNP Papua dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh sebab itu perlu adanya ketransparansian dalam penggunaannya. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 BNNP Papua berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Papua. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 Tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan BNN Republik Indonesia

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

2. Tugas.

Tugas BNNP Papua adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Papua menyelenggarakan fungsi BNN di Provinsi Papua:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP Papua.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
- f. Mengikuti pembinaan teknis dibidang P4GN.
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.
- h. Mengikuti penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian Narkoba.
- v. Pengembangan laboratorium uji Narkoba.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4. Kewenangan.

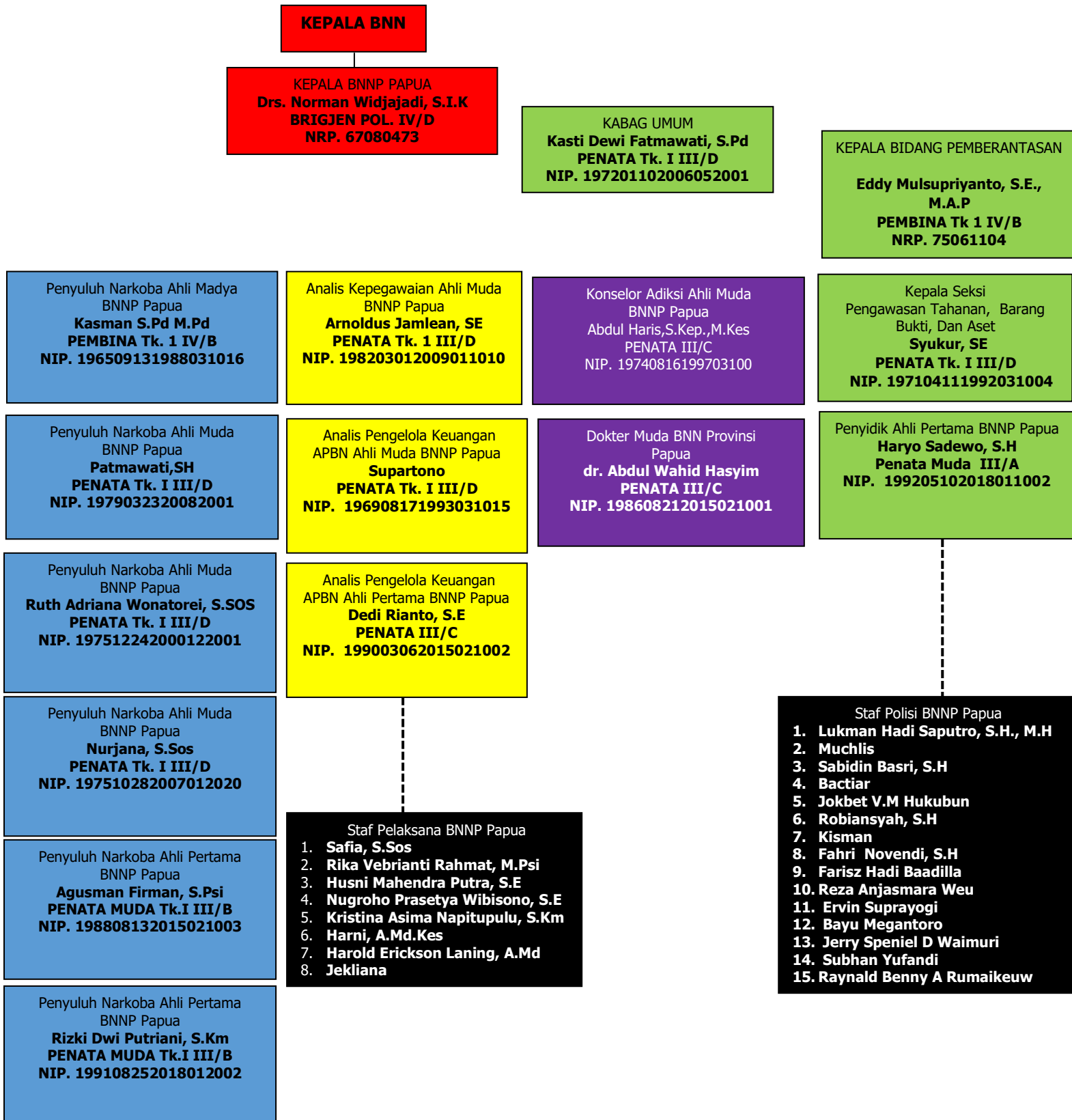
Kewenangan BNNP Papua secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP Papua berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Papua.

D. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNNP Papua
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pemberantasan

STRUKTUR ORGANISASI BNNP PAPUA T.A 2024



Daftar Nama Pegawai BNN Provinsi Papua Tahun 2024

NO	N A M A NIP / NRP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/ ESELON	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5	6
1	NORMAN WIDJAJADI, S.I.K 67080473	Brigjen.Pol/ IV-D	Ka. BNNP II.a	S1	L
2	KASTI DEWI FATMAWATI, S.Pd. 19720110 200605 2 001	Penata Tk.1/ III-D	Kepala Bagian Umum	S1. Pendidikan	P
3	EDDY MULSUPRIYANTO, S.E., M.A.P 75061104	Kombes.Pol/ IV-B	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Papua	S2 Ekonomi	L
4	KASMAN, S.Pd; M.Pd. 19800519 200212 1 006	Pembina/ IV-A	Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP Papua	S2 Pendidikan	L
5	PATMAWATI, SH 19790323 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Hukum	P
6	RUTH A. WONATOREI, S.Sos. 19751224 200012 2 001`	Penata Tk. 1/ III-D	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Sosiologi	P
7	ARNOLDUS JAMLEAN, SE 19820301 200901 1 010	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Kepegawaian Ahli Muda BNNP Papua	S1 Ekonomi	L
8	ABDUL HARIS, S.Kep.,M.Si. 19740816 199703 1 003	Penata Tk. 1/ III-D	Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Papua	S2 Kesehatan	L
9	SUPARTONO 19690817 199303 1 015	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda BNNP Papua	SLTA	L
10	SAFIA, S.Sos. 19790118 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Data Dan Informasi BNN Provinsi Papua	S1 Adm.Negara	P
11	SYUKUR, SE 19710411 199203 1 004	Penata Tk. 1/ III-D	Kepala Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1 Ekonomi	L
12	NURJANA, S.Sos 19751028 200701 2 020	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Papua	S1 Sosial	P
13	dr. ABDUL WAHID HASYIM 19860821 201502 1 001	Penata/III-C	Dokter Muda BNN Provinsi Papua	S1 Kedokteran	L
14	DEDI RIAN TO, SE 19900603 201502 1 002	Penata/III-C	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	S1. Ekonomi	L
15.	LUKMAN HADI SAPUTRO, S.H., M.H 78110884	Penata Muda Tk.I/III-B	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S2. Hukum	L
16.	AGUSMAN FIRMAN, S.Psi. 19880813 201502 1 003	Penata Muda Tk.I/III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1. Psikologi	L
17.	RIZKI DWI PUTRIANI, S.KM 19910825 201801 2 002	Penata Muda/ III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan Masyarakat	P

18.	RIKA VEBRIANTI RAHMAT, M.Psi 19880209 201902 2 003	Penata Muda Tk.I/III-B	Psikolog Klinis Pertama BNN Provinsi Papua	S2 Psikologi	P
19.	KRISTINA ASIMA NAPITUPULU, S.KM 197501092008012014	Penata Muda Tk.I/III-B	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
20.	HARYO SADEWO, S.H 19920510 201801 1 002	Penata Muda/ III-A	Penyidik BNN Ahli Pertama	S1 Hukum	L
21.	HARNI, A.Md.Kes 198404102007012003	Penata Muda / III-A	Pengelola Data Bagian Umum BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
22.	HAROLD ERICKSON LANING, A.Md 197908112006051001	Penata Muda / III-A	Pengelola Data Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	D3 Farmasi	L
23.	JEKLIANA 19881024 201104 2001	Pengatur /II-C	Pengadministrasi Umum Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SMA	P
24.	MUCLIS 81010020	Aiptu/ II-F	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SMA	L
25.	SABIDIN BASRI, SH 81070431	Aiptu/ II-F	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Hukum	L
26.	BACHTIAR 78011039	Aipda/ II-E	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
27.	JOKBET V.M. HUKUBUN 84100861	Aipda/ II-E	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	P
28.	ROBIANSYAH, S.Sos. I 81041182	Bripka/ II-D	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Sosial Islam	L
29.	KISMAN 87040073	Bripka/ II-D	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
30.	FAHRI NOVENDI, S.H 89110137	Bripka/ II-D	Penyidik Seksi Intelijen BNN Provinsi Papua	S1 Hukum	L
31.	FARISZ HADI BAADILLA 93090856	Briptu / II-B	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen	SLTA	L
32.	REZA ANJASMARA WEU 94091228	Briptu / II-B	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan	SLTA	L

			Intelijen BNN Provinsi Papua		
33.	ERVIN SUPRAYOGI 96010743	Briptu / II-B	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
34.	BAYU MEGANTORO 96100624	Briptu / II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
35.	JERRY SPENIEL D WAIMURI 96110637	Briptu / II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
36.	SUBHAN YUFANDI 97030459	Briptu / II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
37.	RAYNALD BENNY ANDIKA RUMAIKEUW 99050043	Briptu / II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
38.	Dr. GRACE MERRY KAWENGIAN 198705052023212016	X	Dokter Ahli Pertama BNNP Papua	S1 Kedokteran	P
39.	STEF MARTHIN SULA RERO, S.Psi 199511112023211012	IX	Konselor Adiksi Ahli Pertama		
40.	DEWI IRIANI MAHIFA, Amd, Kep 199112082023212015	VII	Perawat Terampil BNNP Papua	D3 Keperawatan	P

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibidang Pencegahan P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup.

Lampiran-Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PK adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Pihak pihak yang melaksanakan PK meliputi Pimpinan Kementerian/ Lembaga, Pimpinan Unit Organisasi mulai eselon I, II, III, dan IV, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal, Pimpinan Unit Kerja Mandiri hingga level individu yang menjadi anggota organisasi. Dokumen PK terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Pernyataan perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu yang ditandatangani pihak yang berjanji / sepakat, sedangkan Lampiran Perjanjian Kinerja berisi informasi kinerja yang diperjanjikan terdiri atas variabel sasaran, indikator, dan target. Variabel dalam Lampiran PK inilah yang menjadi sumber acuan dalam konteks penyusunan LKIP setiap unit organisasi.

Visi misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :

“Mewujudkan masyarakat Provinsi Papua yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua menetapkan misi Organisasi sebagai berikut :

Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :

“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Provinsi Papua dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.

A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja BNNP Papua Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,51	Indeks

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	6	Unit
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	8	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	%
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	%
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96,78	%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	80	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42	Indeks

DIPA BNNP PAPUA T.A 2024

No.	Kode Output	Indikator Output / Kegiatan	Pagu
1	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	39,456,000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	74,596,000
3	3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	81,210,000
4	3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	50,000,000
5	3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	18,816,000
6	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	221,702,000
7	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	21,750,000
8	3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	39,000,000
9	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	57,950,000
10	3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	15,580,000
11	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	125,192,000
12	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	31,756,000
13	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52,026,000
14	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	700,000,000
15	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	166,350,000
16	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,786,375,000
17	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,104,000
18	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	12,500,000
19	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18,727,000
20	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,343,613,000
21	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,000,000
Jumlah Total			7,877,703,000

B. Strategi Dalam Mencapai Target Kinerja T.A 2024

Rencana strategis pada hakikatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaian tujuan yang produktif, efektif, dan efisien. Rencana Strategis BNNP Papua dalam mencapai target kinerja T.A 2023 mengacu pada Rencana Strategis BNN tahun 2020 - 2024 (Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional tahun 2020 - 2024). Rencana strategis ini bertujuan untuk menjawab isu aktual dalam lingkungan strategis yang ada. BNN mempunyai 3 strategi pendekatan dalam mewujudkan P4GN itu sendiri yaitu Hard Power Approach, Soft Power Approach, dan Smart Power Approach. BNNP Papua

bergerak dalam sisi demand reduction dan Supply Reduction melalui rangkaian program dan kegiatan berupaya untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus pemberantasan narkotika di tanah Papua.

C. Kebijakan Kepala BNNP Papua Dalam Mencapai Target Kinerja T.A 2024

Kebijakan Kepala BNNP Papua dalam bidang pencegahan antara lain pengembangan metode pendidikan anti narkoba (disesuaikan dengan basis jenjang usia, keragaman background kelompok sasaran atau segmentasi kelompok sasaran), pengembangan sistem pencegahan penyalahgunaan berbasis masyarakat, dan inovasi informasi dan edukasi melalui media massa dan sosial. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas yaitu:

1. Reformasi manajemen pendidikan anti narkoba khususnya pada kalangan generasi muda dan advokasi publik untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Pembentukan Satgas Anti Narkoba di setiap sekolah, Pembentukan Penggiat dan Relawan Anti Narkoba di Masyarakat, dan Pemilihan putra/putri Papua Anti Narkoba bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Papua
2. Advokasi penyusunan Perda Provinsi Papua No. 6 tahun 2028 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Kebijakan dalam Bidang Pemberantasan adalah membuat MOU dengan Stakeholder terkait seperti Lapas Narkotika Doyo, Bea Cukai Provinsi Papua, Direktorat Narkoba Polda Papua, Satgas Pamtas TNI di perbatasan RI-PNG. Disamping itu bidang berantas juga berperan penting dalam screening awal tersangka kasus narkotika melalui Tim Assesmen Terpadu (TAT). Sedangkan untuk bidang Rehabilitasi kebijakan BNNP Papua adalah membentuk IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dan mengikutsertakan masyarakat untuk mengintervensi ke masyarakat yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba di tanah Papua. Disamping itu juga bidang Rehabilitasi

BNNP Papua melaksanakan PNPB berupa pelayanan SKHPN untuk masyarakat yang ingin menggunakan surat tersebut untuk melamar kerja, masuk sekolah dan lain-lain.

D. Aktifitas / Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Mencapai Target Kinerja T.A 2024

No.	Kode Output	Indikator Output / Kegiatan	Pagu
1	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	39,456,000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	74,596,000
3	3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	81,210,000
4	3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	50,000,000
5	3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	18,816,000
6	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	221,702,000
7	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	21,750,000
8	3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	39,000,000
9	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	57,950,000
10	3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	15,580,000
11	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	125,192,000
12	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	31,756,000
13	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52,026,000
14	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	700,000,000
15	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	166,350,000
16	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,786,375,000
17	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,104,000
18	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	12,500,000
19	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18,727,000
20	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,343,613,000
21	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,000,000
Jumlah Total			7,877,703,000

E. Revisi Anggaran BNNP Papua (DIPA dan POK) Selama Tahun 2024

BNNP Papua selama tahun 2023 tercatat di dalam OMSPAN RKA Kemenkeu telah melakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali dan Revisi POK sebanyak 11 kali diantaranya :

1. Revisi DIPA Eselon 1 Blokir AA (Automatic Adjustment) tanggal 27 Desember 2022 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:3998-7669-4822-6933

2. Revisi DIPA Kanwil Penambahan Akun PPPK tanggal 20 Juli 2023 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:3998-7669-4822-6933
3. Revisi DIPA Kanwil Perbaikan Akun PPPK tanggal 25 Juli 2023 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:3998-7669-4822-6933
4. Revisi DIPA Eselon 1 Relaksasi AA (Automatic Adjustment) tanggal 14 September 2023 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:4686-8981-1884-0200
5. Revisi DIPA Eselon 1 Pagu Minus Hapus Blokir tanggal 20 Oktober 2023 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:3472-1220-4901-5267
6. Revisi DIPA Kanwil Pagu Minus Belanja Pegawai tanggal 29 Desember 2023 NOMOR : SP DIPA- 066.01.2.682757/2023 DS:3472-1220-4901-5267

F. Efisiensi Anggaran BNNP Papua T.A 2024

BNNP Papua selama tahun 2024 ini melakukan efisiensi anggaran melalui program pemerintah yaitu Automatic Adjustment (Blokir Anggaran) sebesar 720.278.000 yang tersebar di beberapa akun kegiatan, yang tadinya DIPA awalnya 7.569.379.000 menjadi definitive anggaran yang bisa dikelola sebesar 6.849.101.000. Kemudian di tanggal 20 Juli 2023 ada revisi penambahan anggaran PPPK sehingga total anggaran BNNP Papua naik menjadi 7.199.780.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2024 BNNP Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran kinerja / kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 19 (sembilan belas).

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Papua selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNP Papua Tahun 2023, BNNP Papua akan menggunakan data hasil survei kerjasama antara Puslitdatin BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia, namun dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah data / hasil survey belum kami terima, data tersebut kami harap segera kami terima sebagai dasar perhitungan untuk menentukan prosentase capaian dengan pertimbangan karakteristik daerah yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Hasil perumusan atas pelaksanaan survei tersebut dijadikan sebagai data pembanding dalam evaluasi capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

1**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten /Kota	100 %

Untuk Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi Papua, tahun 2024 ini mendapatkan target 2 Kabupaten/Kota yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Nilai Dekteri kedua Kabupaten tersebut berkategori tinggi dengan nilai sebagai berikut :

33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH

Dari nilai diatas menunjukkan bahwa untuk Kabupaten Jayapura nilai Dekteri nya sangat rendah menunjukkan tingkat kesadaran remaja terhadap penyalahgunaan narkoba yang masih sangat minim. Sehingga perlunya digalakkan lagi sosialisai ke sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat.

2

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

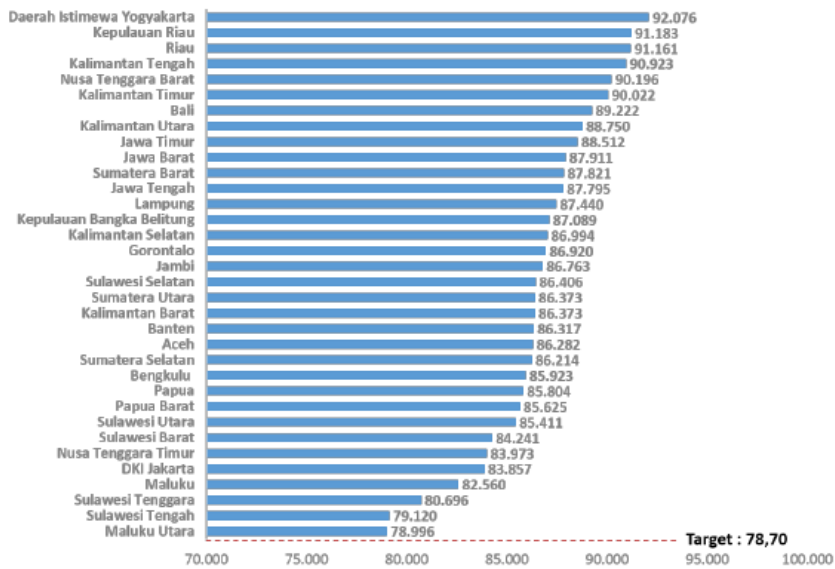
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi.	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100 %

Dari tabel di atas, terlihat indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Papua tahun 2024 dikategorikan “Tinggi” dengan nilai akumulasi 85,268 (Tinggi). Terlihat indeks 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura dengan nilai 82,054 (Tinggi) dan Kabupaten Mimika dengan nilai 90.089 (Sangat Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua secara agregat tingkat kesadaran akan bahaya narkoba dilingkungan keluarga termasuk Tinggi. Artinya outcome dari kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan BNNP Papua, BNNK Jayapura dan BNNK Mimika kepada masyarakat sudah sangat berhasil dan memberikan dampak positif.

205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**



3

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi . Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %

Laporan Angka Indeks Kemandirian Partisipasi (Capaian Outcome) Tahun 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
198	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
199	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
200	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
201	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
202	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
203	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
204	BNNP PAPIA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
205	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
206	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
207	BNNP PAPIA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

4

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan
Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %

Untuk kawasan rawan di wilayah Provinsi Papua yang beralih status dari “Waspada” Menjadi “Aman” tahun 2024 adalah Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Utara Kota

Jayapura, dengan lifeskill atau jenis pelatihan di Kelurahan Ardipura adalah Pembuatan Kerupuk Sagu.

Jumlah Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif					
Satker	Nama Kawasan	Jenis Lifeskill	Faktor Pokok	Faktor Pendukung	Keterangan
BNNP Papua	Kelurahan Ardipura	Pembuatan Kerupuk Sagu	1. Angka Kejahatan Tinggi 2. Angka Pengguna Narkoba 3. Barang Bukti Narkoba 4. Kurir Narkoba	1. Hunian dengan privacy tinggi 2. Ketiadaan sarana publik 3. Rendahnya interaksi sosial masyarakat	Kota Jayapura

5	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan
----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	2.51 Indeks	2,62	1,04 %

Nilai yang menjadi patokan adalah kawasan rawan yang diintervensi di wilayah Kelurahan Ardipura Kota Jayapura. Tahun 2024 BNNP Papua mampu melebihi target pusat yaitu sebesar 2,62 %.

6

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Persentase Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68 %	97,47	143,3

Untuk Persentase Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup , sesuai PK 2024 BNNP Papua mendapatkan target 68 % . Dari target tersebut BNNP Papua mampu mencapai angka yaitu 97,47 %. Sedangkan untuk BNNK Jayapura dan BNNK Mimika masing-masing mendapatkan angka peningkatan kualitas hidup sebesar 95,24 % dan 3,06 %.

7

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Untuk Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih sesuai PK 2024 BNNP Papua dan jajaran BNNK nya mendapatkan target 10 orang. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan 10 orang. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %. Alasan faktor yang membuat kita over prestasi atau melebihi target karena puskesmas dan rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Bidang Rehabilitasi BNNP Papua sangat mendukung rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjadi mitra BNNP juga antusias mengirimkan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menangani korban penyalahguna narkoba di masyarakat untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi petugas rehabilitasi.

8	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
---	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya *adalah Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	0 Lembaga	0

Untuk target Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi Papua tahun ini tidak tercapai karena tidak memenuhi kriteria.

9	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
----------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya *adalah Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional	6 Unit	6 Unit	100

Untuk *Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional* sesuai PK 2024 BNNP Papua mendapatkan target 6 Unit. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mencapai target 100 % yang terdiri dari 2 unit IBM di BNNP Papua, 2 unit IBM di BNNK Jayapura dan 2 unit IBM di BNNK Mimika.

Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional		
No.	Nama Satker	Nama Unit IBM
1.	BNNP Papua	Kampung Skouw Sae
2.	BNNP Papua	Kampung Skouw Yambe
3.	BNNK Jayapura	Kelurahan Hinekombe
4.	BNNK	Kelurahan Sentani Kota

	Jayapura	
5.	BNNK Mimika	Kampung Kamoro Jaya
6.	BNNK Mimika	Kampung Koperapoka

Faktor pendorong IBM terbentuk di Kampung Skow Yambe dan Skow Sae yaitu :

- Dukungan dari Pemerintah Distrik dan Kabupaten dengan adanya pengakuan anggaran yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi pembentukan IBM
- Adanya dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda yang ada di Kampung Skow Yambe dan Skow Sae.

Sedangkan hambatannya adalah :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pecandu/penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri
- Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana IBM masih kurang
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan IBM di Kampung.

Adapun untuk IBM di BNNK Mimika adalah Kampung Kamoro Jaya dan Kampung Koperapoka. Sedangkan IBM di BNNK Jayapura adalah Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Sentani Kota faktor pendorongnya adalah :

- adanya dukungan dari perangkat desa mengenai program IBM ini
- Kepala kelurahan bahkan menjadi pembina secara langsung dalam menjalankan program IBM di Kampung/Kelurahan tersebut
- Apresiasi dari warga dan besarnya kepedulian terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut sehingga program IBM dapat terbentuk dan berjalan dengan baik sejauh ini

Sedangkan hambatannya adalah :

- Tidak terpenuhinya anggaran untuk menjalankan kegiatan IBM sesuai target yg ditetapkan

10**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan
Rehabilitasi Narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks	3,65	106,7

Untuk Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua sesuai PK 2024 BNNP Papua mendapatkan target 3,42 %. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan nilai sebesar 3.65 % dengan predikat mutu “A” (sangat baik). Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 106.7 %.

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Satker	IKM	Skala 4	Kategori
1.	Klinik Cenderawasih	BNNP Papua	3,42	3.65	A

11

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah berkas perkaratindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21* . Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang P-21	8 Berkas Perkara	10	125 %

Untuk *Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21* sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 8 berkas perkara untuk semua jajaran BNNP Papua. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan realisasi LKN sebanyak 10 berkas. Indikator kinerja ini melampaui target atau over prestasi karena meningkatnya peredaran gelap narkotika baik jenis ganja maupun Kristal Metamfetamina (sabu-sabu) di tanah Papua. Dari jumlah kasus narkotika yang P21 tersebut masih didominasi kasus ganja dan beberapa ada kasus sabu-sabu (*methamphetamine*) yang berasal dari luar Papua. Berikut rincian kasusnya :

Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNP Papua tahun 2024

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNP PAPUA	15 Januari 2024	LKN/0001-NAR/I/2024/BNNPPapua	RAHMAT alias JENGGO	Ganja Kering 340,62 Gram
2.	BNNP PAPUA	20 Januari 2024	LKN/0002-NAR/I/2024/BNNPPapua	ICUK GORIS GURINDRA alias ICUK	Ganja Kering 267,19 Gram
3.	BNNP PAPUA	1 Maret 2024	LKN/0003-NAR/III/2024/BNNPPapua	THEO DORUS BARANSANO	Ganja Kering 18,68 Gram

4.	BNNP PAPUA	13 Maret 2024	LKN/0004NAR/III/2024/BNNPPapua	HENDRA STEFANUS	Ganja Kering 378,24 Gram
5.	BNNP PAPUA	15 Maret 2024	LKN/0005-NAR/III/2024/BNNPPapua	DENTEL MENEPEL MATAU JHON KELLES	Ganja Kering 1011,69 Gram
6.	BNNP PAPUA	6 Mei 2024	LKN/0006-NAR/V/2024/BNNPPapua	DIRCK DOMINGGUS RUMBINO SATRYA REZA TRIYANTO	Sabu/ Metamfetamin Kristal 5,23 gram
7.	BNNP PAPUA	14 Juni 2024	LKN/0007NAR/VI/2024/BNNPPapua	WAKINUS WANIMBO alias WAKI	Ganja Kering 61,31 Gram
8.	BNNP PAPUA	14 Juni 2024	LKN/0008-NAR/VI/2024/BNNPPapua	DALYSON TABUNI alias ACEM	Ganja Kering 24,22 Gram
9.	BNNP PAPUA	16 Juni 2024	LKN/0009-NAR/VI/2024/BNNPPapua	ROBERT MAUNDA	Ganja Kering 203,54 Gram
10.	BNNP PAPUA	19 Juni 2024	LKN/0010-NAR/VI/2024/BNNPPapua	GIDION SUWAE alias GIDI DKK	Ganja Kering 887,52 Gram

12	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika
----	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100 %

Dari hasil penilaian internal kami untuk Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, Dan Kesehatan Tahanan di BNNP Papua untuk tahun 2024 ini adalah 100. Hal ini karena sudah tertata rapi SOP Wastahti yang mengatur jadwal besuk jenguk tahanan dan rutin

bekerja sama dengan bidang rehabilitasi untuk setiap bulannya tahanan melakukan tes kesehatan di Klinik Cenderawasih BNNP Papua. Disamping itu tahanan saat mau dipindahkan ke Rutan Lapas Narkotika Doyo dilakukan tes HIV di Rumah Sakit Bhayangkara Abepura.

13	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %

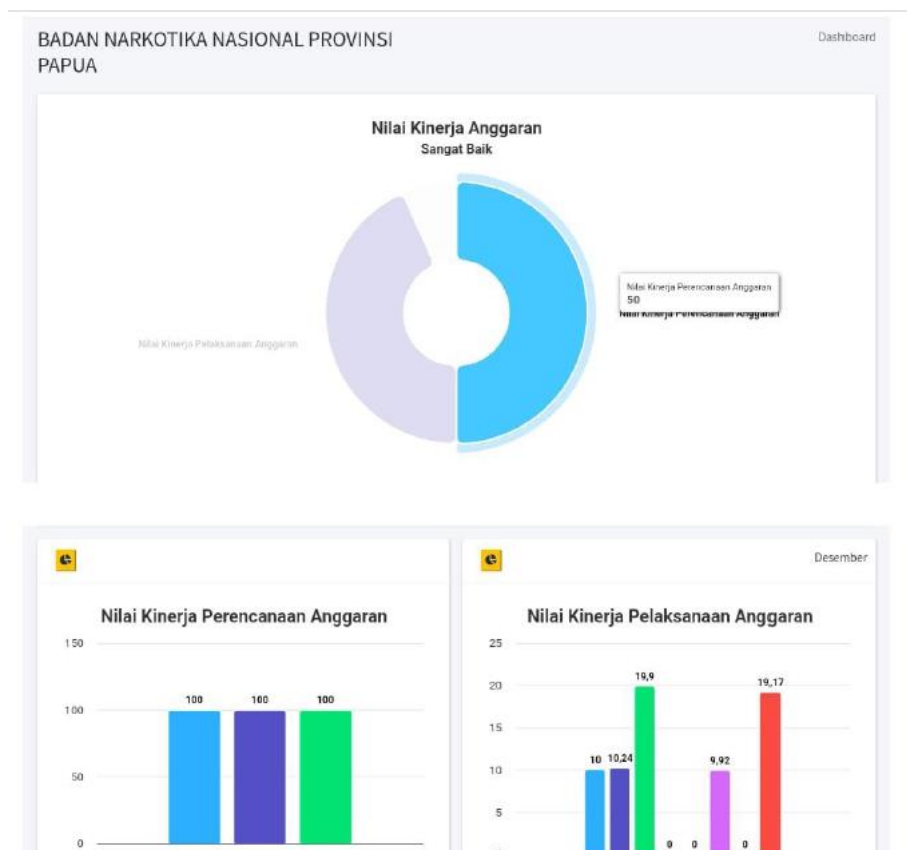
Untuk Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika, menurut hasil penilaian internal kami mencapai nilai 100 persen di tahun 2024. Hal ini karena bidang Wastahti BNNP Papua telah memiliki asset Berangkas untuk penyimpanan BB dan senjata. Sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan BB atau penyalahgunaan BB oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu pemasangan CCTV pada tiap ruang tahanan dan sudut lorong pemberantasan juga memberikan nilai tambah dalam penilaian internal ini.

14

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target* yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	80 Indeks	93,27	116,5



Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	100,00	86,54	93,27

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

MONEY

15

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi* dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	100

Target Nilai Kinerja Anggaran di BNNP Papua dan jajaran yaitu BNNK Jayapura sebesar 87 % realisasi 99,73 dengan predikat sangat baik. Sedangkan untuk BNNK Mimika target sebesar 55 % realisasi 98,20 dengan predikat kurang.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MIMIKA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

Role

Pilih TA (2024)

Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

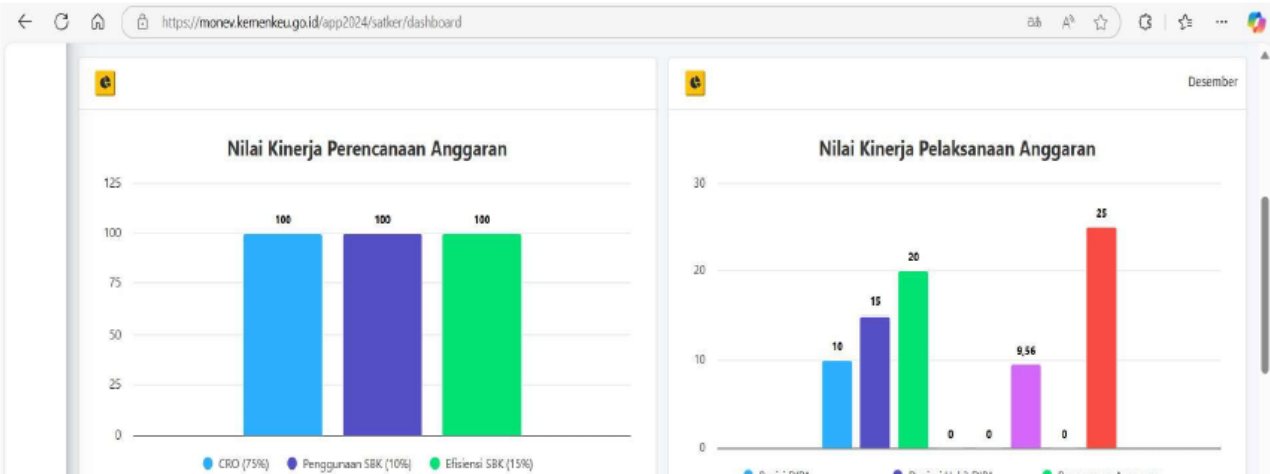
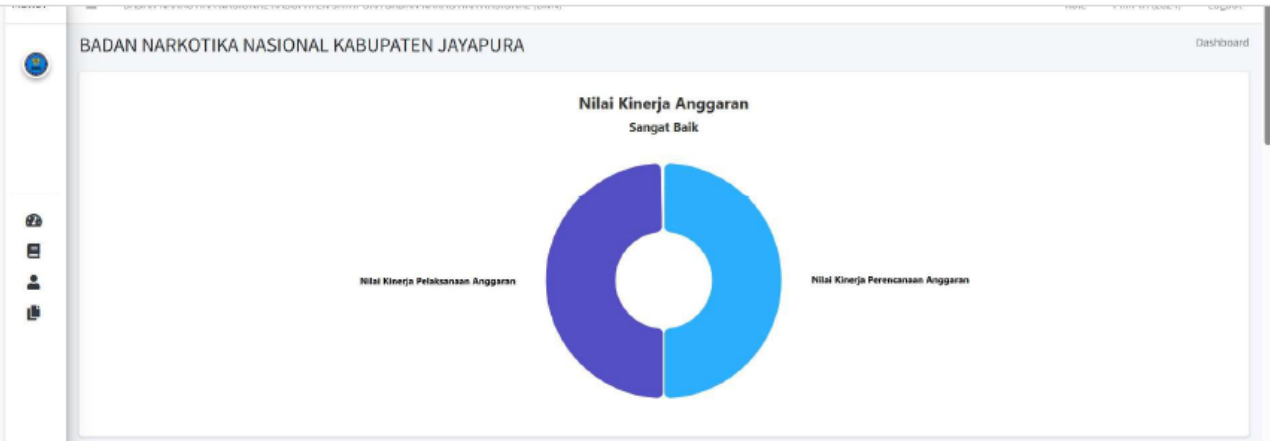
Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	410206	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika	100,00	96,40	98,20

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya



Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	620067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	100,00	99,43	99,73

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

NO.	SATKER	TARGET NILAI KINERJA ANGGARAN (%)	NILAI SMART 2024 (%)
1.	BNNP Papua	80	93,27
2.	BNNK Jayapura	87	99,73
3.	BNNK Mimika	55	98,20

16

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi
Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	96.78 %	93,83	96,95



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	063	066	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	68.27	99.50	0.00	0.00	99.23	100.00	75.06	80%	0.00	93.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.24	19.90	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	84.14		99.37				100.00				

Nilai IKPA BNNP Papua tidak mencapai target karena adanya kekurangan di realisasi anggaran dan pengelolaan UP dan TUP yang belum maksimal.

17

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	100

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua T.A 2024 yaitu 86,54 dari target 96,78 %. Sedangkan untuk BNNK Jayapura nilai IKPA nya sebesar 99.45 dari target 97,27 % dan BNNK Mimika realisasi sebesar 91,54 % dari target pusat sebesar 95,23 %. Jadi nilai IKPA keseluruhan BNNP Papua dan jajaran telah melebihi target yang ditentukan oleh BNN RI.

NO.	SATKER	TARGET IKPA (%)	NILAI IKPA 2024 (%)
-----	--------	-----------------	---------------------

1.	BNNP Papua	96,78	86,54
2.	BNNK Jayapura	97,27	99,45
3.	BNNK Mimika	95,23	91,54

Nilai IKPA BNNK Jayapura T.A 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	063	066	689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	95.59	100.00	79.56	80%	0.00	99.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.80				100.00				

Nilai IKPA BNNK Mimika T.A 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MIMIKA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	14			BADAN NARKOTIKA	Nilai	100.00	82.36	99.04	0.00	0.00	99.56	84.45				91.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				

18

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	52,60	70,1

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal* yang di nilai oleh Inspektorat BNN DAN TPI. Berdasarkan hasil penilaian ZI BNNP Papua mendapatkan rangking 34 dari 34 Provinsi dengan nilai ZI yaitu 52,60. Berikut adalah tabel penilaiannya :

PIC IMAN (085642906420)			INDIKATOR BNN PROVINSI
NO	KODE	SATUAN KERJA VERTIKAL	Nilai Zona Integritas BNN Provinsi oleh TPI <i>Satuan: Angka</i>
			CAPAIAN 2024
104	082055	BNN Provinsi Sulawesi Selatan	80,72
168	682701	BNN Provinsi Sulawesi Tenggara	84,39
173	682722	BNN Provinsi Sulawesi Barat	
175	682736	BNN Provinsi Maluku	75,67
178	682740	BNN Provinsi Maluku Utara	
182	682516	BNN Provinsi Bali	
189	682520	BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat	88,06
194	682537	BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur	
198	682715	BNN Provinsi Gorontalo	
204	682757	BNN Provinsi Papua	52,6
207	682761	BNN Provinsi Papua Barat	79,8

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governant*) dilingkungan BNN. LAKIP BNNP Papua merupakan hasil kerja BNNP Papua dalam turut serta membangun Negara secara khusus di Provinsi Papua dalam meningkatkan upaya P4GN. Anggaran BNN Provinsi Papua T.A 2024 yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar **Rp. 7,199,780,000** berasal dari sumber dana APBN dengan realisasi anggaran sebesar **95.22 %** dan realisasi output sebesar **76,67 %**.

Saran

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen (ASN dan POLRI) untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN di Tanah Papua.
2. Perlu adanya pembangunan Kantor sendiri milik BNN Provinsi Papua sehingga dapat menunjang kinerja operasional BNN di Tanah Papua.
3. Perlu adanya fasilitas dan kapasitas lembaga Rehabilitasi milik BNN di Tanah Papua sebagai wujud kepedulian BNN Pusat terhadap BNN Provinsi Papua di ujung Indonesia timur.
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
5. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	2 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	dan prekursor narkoba yang P-21	
11	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks